

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi

2.1.1.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Secara umum sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Akuntansi itu sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Sebagaimana definisi sistem informasi akuntansi yang diungkapkan oleh Marshal B. Romney dan Paul John Steinbart (2015:36) yaitu:

“accounting information system is a system that collect, records, stores, and processes data to produce information for decision makers, include people, procedures and instruction, data, software, information technology infrastructure, and internal controls and security measures.”

“Sistem informasi akuntansi adalah suatu system yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan, meliputi orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan.”

Menurut Atyanto Mahatmyo (2014:9) menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi yaitu:

“Sistem Informasi Akuntansi merupakan sekelompok struktur dalam suatu entitas yang mengelola sumber daya fisik dan sumber daya lain untuk mengubah data ekonomi dan menjadi informasi akuntansi, agar dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak”.

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2017:80) sebagai berikut :

“Sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan dan bekerjasama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.”

Dari pernyataan diatas maka sistem informasi akuntansi dapat dikatakan sebagai kumpulan dari sub-sub sistem yang saling terkait (intergrasi) mulai dari mengumpulkan, menyimpan, dan menghasilkan informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dibidang keuangan.

2.1.1.2. Ciri-Ciri Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Azhar Susanto (2017:22) sesuatu baru dapat disebut sistem, jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Tujuan sistem

Merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Sistem ada karena tujuan. Sistem dibangun agar tujuan tercapai tidak menyimpang sehingga resiko kegagalan bisa diminimalkan.

2) Batas sistem

Merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Bila batas sistem ditentukan oleh orang yang tidak kompeten dibidangnya maka resiko yang dihadapi adalah sistem akan menyimpang dari tujuan.

3) Subsistem

Merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem baik fisik ataupun abstrak. Sub sistem akan memiliki sub sistem yang lebih kecil dan seterusnya. Istilah lainnya adalah komponen, elemen atau unsur.

4) Hubungan dan Khirarki Sistem

Merupakan hubungan yang terjadi antar subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar.

5) Input-proses-output

Ciri lain dari suatu sistem adalah melihat sistem dari sudut fungsi dasarnya yaitu: *Input*, *Proses* dan *Output*. Fungsi ini juga menunjukkan bahwa sistem sebagai proses tidak bisa berdiri sendiri, harus ada *input* dan *output*.

6) Lingkungan sistem

Merupakan faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Lingkungan sistem ada dua macam yaitu: Lingkungan eksternal (di luar sistem di luar organisasi) dan lingkungan internal (di luar sistem di dalam organisasi).

2.1.1.3. Indikator Sistem Informasi Akuntansi

Indikator sistem informasi menurut Delone and McLean (2003:26), antara lain:

1) Adaptasi (*Adaptability*)

Adaptability suatu sistem informasi menunjukkan bahwa sistem informasi yang diterapkan tersebut memiliki kualitas yang baik. *Adaptability* yang dimaksud adalah kemampuan sistem informasi dalam melakukan perubahan-perubahan kaitannya dengan memenuhi kebutuhan pengguna

serta mudah diadaptasikan di dalam organisasi perusahaan dan mudah di adaptasi oleh pengguna.

2) Ketersediaan (*Availability*)

Sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan dan digunakan dengan mencantumkan pada pernyataan atau perjanjian tingkat pelayanan.

3) Keandalan Sistem (*Reliability*)

Sistem informasi yang berkualitas adalah sistem informasi yang dapat diandalkan. Jika sistem tersebut dapat diandalkan maka sistem informasi tersebut layak digunakan. Keandalan sistem informasi dalam konteks ini adalah ketahanan sistem informasi dari kerusakan dan kesalahan.

4) Waktu Respon (*Response Time*)

Waktu respon sistem, mengasumsikan respon sistem yang cepat atau tepat waktu terhadap permintaan akan informasi.

5) Kegunaan (*Usability*)

Usaha yang diperlukan untuk mempelajari, mengoperasikan, menyiapkan *input*, dan mengartikan *output* dari *software*.

2.1.2 Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.1.2.1. Pengertian Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengertian barang milik daerah menurut Moermahadi Djanegara (2017,63)

yaitu:

“Barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yakni perolehan dari hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Menurut Puji Agus (2019:2) barang milik daerah yaitu:

“Barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yakni perolehan dari hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19

Tahun 2016, Barang milik daerah yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah, yang meliputi antara lain.

- a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;
- d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- e) Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan pernyataan diatas maka barang milik daerah yaitu semua barang yang dimiliki daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2.1.2.2. Jenis Barang Milik Daerah

Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- 1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- 2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- 1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- 2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- 3) Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dilihat dari mobilitas barangnya, barang milik daerah dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Benda tidak bergerak (*real property*), meliputi tanah, bangunan, gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, serta monumen/bangunan bersejarah (*heritage*).
- 2) Benda bergerak (*personal property*), yaitu mesin, kendaraan, peralatan (meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan,

hewan/ternak dan tanaman, persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dan sebagainya), serta surat-surat berharga.

2.1.2.3.Indikator Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 kegiatan pengelolaan barang milik daerah meliputi:

1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

2) Penilaian

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu. Penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3) Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

4) Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian adalah usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Hery (2015: 5) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran dan transaksi bisnis. Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Definisi laporan keuangan yang dikemukakan oleh Pirmatua Sirait (2014:19) yaitu:

“Laporan keuangan (*Financial Statement*) merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, sebagai ikhtisar dari transaksi-transaksi keuangan selama periode berjalan.”

Pengertian laporan keuangan menurut Jumingan (2014:4) yaitu:

“Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan yang disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan para ahli diatas, maka dapat disimpulkan laporan keuangan adalah suatu laporan yang merupakan

hasil akhir dari proses akuntansi mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode.

2.1.3.2. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komponen laporan keuangan pemerintah daerah menurut Abdul Halim (2016:273) yaitu:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan pada APBD.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pada suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah.

5) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, CaLK mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.3.3. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto (2015:25) mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas Laporan Keuangan adalah ukuran orang yang menilai atau merinci dari suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukutan, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelanaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

2.1.3.4.Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Indikator Laporan Keuangan yang berkualitas dijelaskan oleh Jumingan (2014:5) yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

a) Memiliki Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki Manfaat Prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Romney & Steinbart (2015:10) menyatakan bahwa Sistem informasi Akuntansi memiliki kontribusi yang kuat terhadap Kualitas Laporan Keuangan, terutama dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan

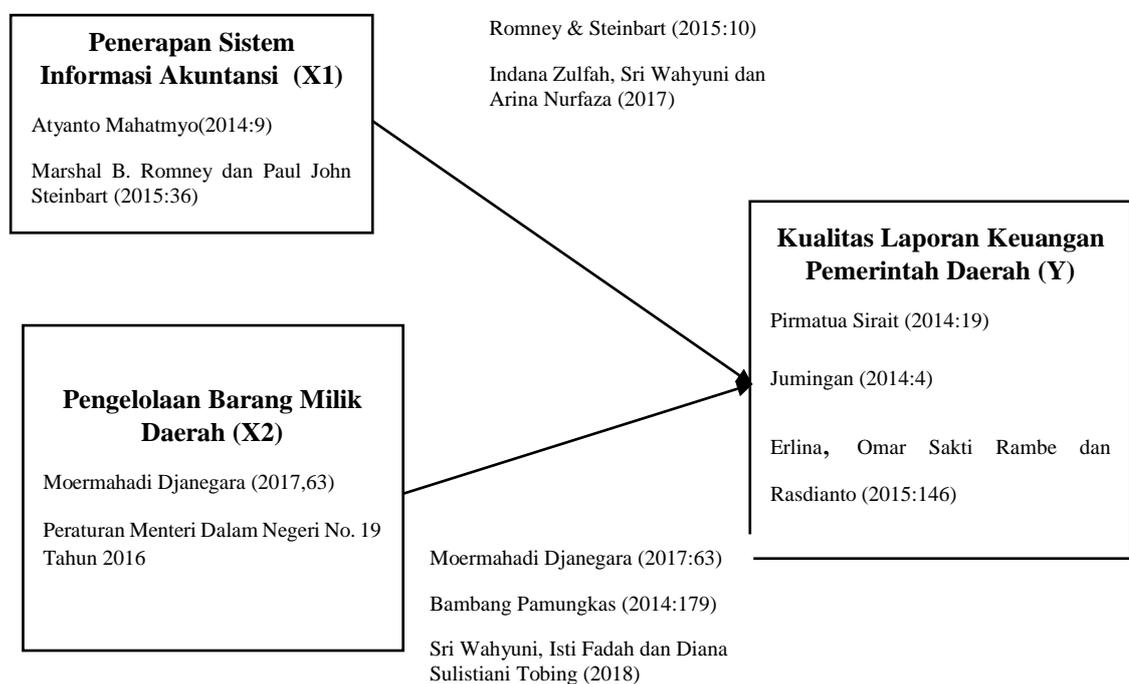
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Inta Budi Setya Nusa (2013) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dapat menciptakan kualitas informasi yang optimal. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rukmi Juwita (2013) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Lalu berdasarkan penelitian Indana Zulfah, Sri Wahyuni dan Arina Nurfaza (2017) menyatakan bahwa Sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.

2.2.2. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Moermahadi Djanegara (2017:63) menyatakan bahwa pengelolaan aset yang baik dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Bambang Pamungkas (2014: 179) menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah yang baik menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan.

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan Sri Wahyuni, Isti Fadah dan Diana Sulistiani Tobing (2018) menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian berdasarkan penelitian Rudianto Simamora dan Abdul Halim (2012) menyatakan bahwa pengelolaan aset berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:39) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

H₁ : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H₂ : Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.